JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN INDONESIA
https://indojurnal.com/index.php/jiemi
eISSN 3124-2197 & pISSN 3124-2227
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/xmphkj57
Hal. 5483-5493

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Dinamika Pasar Bebas di Indonesia

Aan Nursintia Dewi[1], Kesya Amelia Putri[2], Muhammad Daffa[3], Najib Muhammad[4], Nia Febriyani Sofhiyani[5]
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang[1,2,3,4,5]

*Email: aannursintia06@gmail.com, kesyaputri34300@gmail.com, niafebriyanisofhiyani@gmail.com

Diterima: 11-11-2026 | Disetujui: 16-11-2026| Diterbitkan: 18-11-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Indonesian government policy in responding to free market dynamics and to identify the accompanying challenges and opportunities. Free trade brings dual consequences for the national economy: opportunities for increased investment and export market expansion on one hand, and risks of weakened domestic industrial competitiveness and economic dependency on the other. This research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method, with data drawn from official government documents, related institutional reports, and academic literature. The findings indicate that government policies-particularly in fiscal, monetary, trade, and strategic industry protection-play an essential role in balancing global economic openness with the protection of national interests. Nevertheless, the effectiveness of these policies still faces structural challenges, such as the low competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and limited cross-sector coordination. This study recommends the need for more adaptive, data-driven policies oriented toward strengthening long-term competitiveness.

Keywords*: free market; government policy; international trade; economic competitiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika pasar bebas serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya. Pasar bebas membawa konsekuensi ganda bagi perekonomian nasional, yaitu peluang peningkatan investasi dan perluasan pasar ekspor di satu sisi, serta risiko pelemahan daya saing industri domestik dan ketergantungan ekonomi di sisi lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang datanya bersumber dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga terkait, dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya di bidang fiskal, moneter, perdagangan, dan perlindungan industri strategis, berperan penting sebagai penyeimbang antara keterbukaan ekonomi global dan perlindungan kepentingan nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya daya saing UMKM dan keterbatasan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan daya saing jangka panjang.

Kata kunci: pasar bebas; kebijakan pemerintah; perdagangan internasional; daya saing ekonomi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dewi, A. N. ., Putri, K. A., Daffa, M. ., Muhammad, N., & Sofhiyani, N. F. . (2026). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Dinamika Pasar Bebas di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia, 2(2), 5483-5493. https://doi.org/10.63822/xmphkj57

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong terbentuknya sistem pasar bebas, yaitu suatu tatanan perdagangan yang meminimalkan hambatan seperti tarif, kuota, dan proteksi terhadap arus barang, jasa, serta modal antarnegara. Fenomena ini semakin menguat sejak dibentuknya berbagai forum dan perjanjian perdagangan internasional, seperti World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga berbagai perjanjian dagang bilateral yang melibatkan Indonesia. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum tersebut mencerminkan komitmen negara untuk mengintegrasikan diri ke dalam rantai nilai ekonomi global, sekaligus menempatkan perekonomian nasional pada posisi yang lebih terbuka terhadap dinamika eksternal.

Di satu sisi, pasar bebas membuka peluang besar bagi peningkatan investasi, transfer teknologi, perluasan pasar ekspor, serta efisiensi dalam alokasi sumber daya. Keterbukaan pasar memungkinkan pelaku usaha domestik mengakses bahan baku, teknologi, dan modal dari luar negeri dengan biaya yang lebih kompetitif, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk dalam negeri ke pasar internasional. Namun di sisi lain, keterbukaan pasar juga membawa risiko, seperti membanjirnya produk impor yang dapat melemahkan daya saing industri dalam negeri, ketimpangan struktural antara sektor usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta potensi ketergantungan ekonomi terhadap negara lain, khususnya pada komoditas dan teknologi strategis.

Dalam konteks tersebut, peran kebijakan pemerintah menjadi krusial sebagai penyeimbang antara upaya integrasi ke dalam ekonomi global dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, hingga regulasi perlindungan industri strategis perlu dirancang secara tepat agar pasar bebas dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu membaca peluang sekaligus mengantisipasi risiko yang muncul dari keterbukaan ekonomi, melalui perumusan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar global namun tetap berpijak pada kepentingan pembangunan nasional jangka panjang.

Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh sektor UMKM dengan tingkat produktivitas dan daya saing yang bervariasi. Ketimpangan kapasitas antara pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor dan pelaku usaha kecil yang berorientasi pasar domestik menuntut kebijakan yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas primer turut memengaruhi kerentanan perekonomian nasional terhadap fluktuasi harga global, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia berperan dalam merespons dinamika pasar bebas, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Secara lebih rinci, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana dinamika pasar bebas memengaruhi perekonomian Indonesia; kedua, bagaimana bentuk dan arah kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika tersebut; dan ketiga, apa saja tantangan struktural yang perlu diatasi agar kebijakan yang ada dapat berjalan lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pasar Bebas dan Teori Perdagangan Internasional

Pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang meminimalkan campur tangan pemerintah dalam mekanisme penawaran dan permintaan, sehingga harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh kekuatan pasar itu sendiri. Dalam skala internasional, konsep ini diwujudkan melalui liberalisasi perdagangan yang mengurangi hambatan tarif maupun nontarif antarnegara guna mendorong efisiensi ekonomi global. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menjadi landasan klasik bagi argumen perdagangan bebas, yang menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat apabila berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki biaya oportunitas relatif lebih rendah, kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain.

Perkembangan lebih lanjut dari teori perdagangan internasional, seperti model Heckscher-Ohlin, menekankan bahwa pola perdagangan antarnegara juga ditentukan oleh perbedaan kepemilikan faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja yang besar memiliki keunggulan komparatif pada sektor berbasis komoditas dan padat karya, namun masih menghadapi tantangan dalam sektor industri bernilai tambah tinggi yang membutuhkan modal dan teknologi intensif.

Peran Negara dalam Perekonomian Terbuka

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan, serta melindungi kepentingan nasional. Dalam pandangan ekonomi campuran (mixed economy), negara tetap memiliki peran strategis untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure), termasuk dalam konteks keterbukaan perdagangan internasional. Joseph Stiglitz, misalnya, menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola proses globalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok yang telah memiliki keunggulan kompetitif.

Sementara itu, Dani Rodrik dalam kajiannya mengenai globalisasi ekonomi mengingatkan adanya trilema antara integrasi ekonomi global, kedaulatan nasional, dan demokrasi domestik, di mana suatu negara umumnya hanya dapat mengoptimalkan dua dari tiga elemen tersebut secara bersamaan. Pandangan ini relevan untuk memahami mengapa pemerintah Indonesia perlu secara selektif menentukan sektor mana yang dibuka seluas-luasnya bagi persaingan global dan sektor mana yang memerlukan perlindungan sementara guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Konteks Keterbukaan Ekonomi

Kebijakan fiskal berperan dalam mengarahkan alokasi anggaran negara, termasuk pemberian insentif pajak bagi sektor strategis dan pengaturan tarif bea masuk untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak seimbang. Kebijakan moneter, di sisi lain, berfungsi menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi agar tidak terjadi gejolak ekonomi akibat arus modal asing yang keluar-masuk secara cepat (capital flow volatility), yang lazim terjadi pada perekonomian yang semakin terbuka terhadap pasar global.

Perdagangan Bebas dan Perlindungan Industri Domestik

Literatur kebijakan perdagangan mengenal konsep infant industry protection, yaitu perlindungan sementara terhadap industri dalam negeri yang masih dalam tahap awal perkembangan agar mampu tumbuh

dan bersaing sebelum dihadapkan pada persaingan penuh di pasar global. Kebijakan semacam ini banyak diterapkan oleh negara-negara yang kini menjadi kekuatan ekonomi besar pada masa awal industrialisasinya, dan menjadi salah satu argumen penting bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi, tidak selalu bersifat linier positif, melainkan bergantung pada kesiapan kelembagaan dan struktur industri domestik suatu negara. Kajian-kajian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa manfaat pasar bebas akan lebih optimal apabila diiringi oleh kebijakan pendukung di dalam negeri, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan reformasi regulasi investasi. Studi-studi ini menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menempatkan kebijakan pemerintah sebagai variabel penentu utama dalam menentukan arah dampak pasar bebas terhadap perekonomian Indonesia.

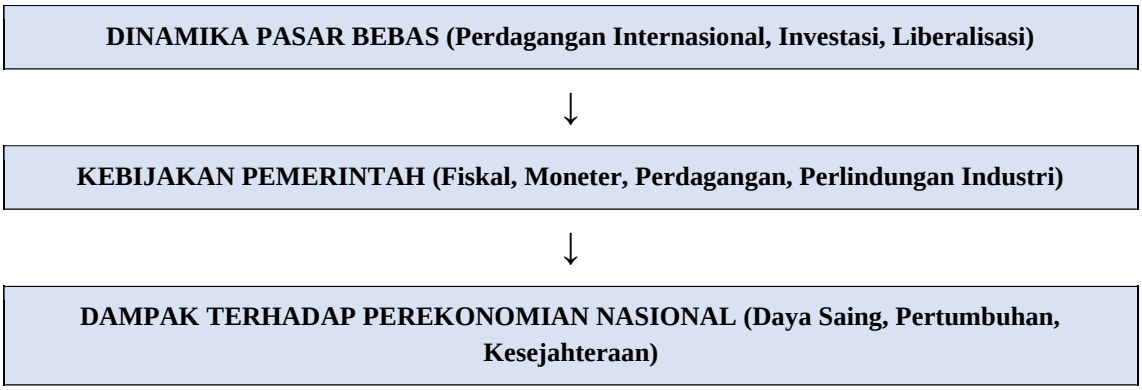
Studi Banding Kebijakan Negara Lain

Pengalaman sejumlah negara Asia dapat menjadi pembanding yang relevan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan menghadapi pasar bebas. Korea Selatan, misalnya, pada masa awal industrialisasinya menerapkan kombinasi antara keterbukaan pasar ekspor dengan perlindungan sementara terhadap industri strategis dalam negeri, disertai investasi besar-besaran pada riset dan pengembangan teknologi, sehingga mampu bertransformasi dari negara pengekspor komoditas menjadi produsen barang manufaktur bernilai tambah tinggi.

Vietnam menempuh strategi yang relatif berbeda, yaitu dengan secara agresif membuka diri terhadap investasi asing melalui insentif fiskal yang kompetitif dan penyederhanaan regulasi investasi, sembari secara bertahap membangun kapasitas industri pendukung (supporting industries) di dalam negeri. Strategi ini menempatkan Vietnam sebagai salah satu tujuan relokasi industri manufaktur global dalam beberapa tahun terakhir. Dari kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menghadapi pasar bebas tidak semata ditentukan oleh derajat keterbukaan, melainkan oleh ketepatan strategi dan konsistensi implementasi kebijakan pendukung di dalam negeri, sebuah pelajaran yang relevan bagi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini menempatkan dinamika pasar bebas sebagai faktor eksternal yang direspons oleh kebijakan pemerintah melalui instrumen fiskal, moneter, perdagangan, dan perlindungan industri, yang pada akhirnya menentukan dampak akhir terhadap daya saing dan kesejahteraan perekonomian nasional.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika pasar bebas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi keterkaitan antar-variabel kebijakan secara kontekstual, tanpa mereduksinya menjadi hubungan statistik semata, mengingat kompleksitas interaksi antara faktor ekonomi, politik, dan kelembagaan yang melingkupi perumusan kebijakan publik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik), publikasi lembaga internasional (WTO, World Bank, IMF), serta jurnal dan buku akademik yang relevan dengan tema pasar bebas dan kebijakan ekonomi. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran informasi yang tersedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi terhadap data statistik serta laporan kebijakan ekonomi. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri kerangka teori dan temuan penelitian terdahulu, sementara studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kebijakan yang telah maupun sedang diterapkan oleh pemerintah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikembangkan dalam model analisis interaktif. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; pada tahap penyajian data, informasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi; dan pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan antar-temuan yang muncul selama proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pasar Bebas dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor nasional, sekaligus meningkatkan arus masuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Sektor-sektor berorientasi ekspor, seperti manufaktur alas kaki, tekstil,

produk elektronik, dan komoditas berbasis kelapa sawit, memperoleh manfaat signifikan dari penurunan tarif dan perluasan akses pasar di negara mitra dagang.

Di sisi lain, keterbukaan ini juga meningkatkan tekanan persaingan bagi pelaku usaha domestik, terutama sektor manufaktur skala kecil dan menengah, yang harus bersaing dengan produk impor yang seringkali lebih murah akibat efisiensi skala produksi negara mitra dagang, subsidi domestik di negara asal, maupun praktik dumping. Dampak pasar bebas terhadap perekonomian Indonesia dengan demikian bersifat dua arah, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Peluang	Tantangan
Perluasan akses pasar ekspor	Persaingan produk impor yang ketat
Peningkatan investasi asing (FDI)	Tekanan terhadap industri dan UMKM domestik
Transfer teknologi dan pengetahuan	Risiko defisit neraca perdagangan
Efisiensi alokasi sumber daya	Ketergantungan ekonomi pada negara mitra
Diversifikasi mitra dagang	Risiko praktik dumping dan persaingan tidak sehat

Bentuk dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pasar Bebas

Pemerintah Indonesia menempuh sejumlah langkah kebijakan lintas sektor untuk merespons dinamika pasar bebas. Kebijakan tersebut dirancang secara berlapis, mencakup instrumen makroekonomi maupun kebijakan sektoral yang lebih spesifik, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diarahkan melalui pemberian insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance, bagi sektor industri prioritas dan investasi berorientasi ekspor, serta pengaturan tarif bea masuk untuk melindungi industri domestik dari lonjakan produk impor yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar dalam negeri.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian nilai tukar dan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas makroekonomi di tengah arus modal yang fluktuatif, mengingat perekonomian yang semakin terbuka membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak keuangan global, termasuk perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

c. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan ditempuh melalui negosiasi perjanjian dagang bilateral maupun multilateral yang menguntungkan kepentingan nasional, termasuk upaya memperjuangkan akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia, sekaligus mempertahankan ruang kebijakan (policy space) untuk melindungi sektor-sektor yang dianggap strategis.

d. Kebijakan Perlindungan Industri Strategis

Perlindungan industri strategis dilakukan melalui instrumen tarif, instrumen non-tarif seperti standar produk (SNI), ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta program substitusi impor pada sektor-sektor tertentu yang dinilai penting bagi kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional, seperti pangan dan energi.

e. Penguatan Daya Saing UMKM

Program penguatan daya saing UMKM ditempuh melalui perluasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, pendampingan ekspor, serta sertifikasi produk agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Penguatan UMKM menjadi krusial mengingat sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun secara umum masih memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan sektor usaha besar berorientasi ekspor.

Studi Kasus Sektoral

Untuk memperkaya analisis, berikut disajikan gambaran dampak pasar bebas dan respons kebijakan pada beberapa sektor strategis perekonomian Indonesia.

a. Sektor Tekstil dan Produk Tekstil

Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor padat karya yang paling terdampak oleh keterbukaan pasar. Di satu sisi, keterbukaan pasar memberi peluang ekspor ke berbagai negara mitra dagang; di sisi lain, industri TPT dalam negeri menghadapi tekanan berat dari membanjirnya produk impor dengan harga yang sangat kompetitif. Pemerintah merespons kondisi ini melalui kebijakan pengamanan perdagangan (trade remedies), seperti bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard), guna melindungi keberlangsungan industri dan lapangan kerja di sektor ini.

b. Sektor Otomotif

Sektor otomotif menunjukkan pola yang berbeda, di mana keterbukaan pasar justru dimanfaatkan pemerintah untuk menarik investasi produsen kendaraan global melalui insentif fiskal, dengan syarat penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) yang terus ditingkatkan secara bertahap. Pendekatan ini memungkinkan transfer teknologi dan pengembangan industri komponen pendukung di dalam negeri, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan ke kawasan regional.

c. Sektor Pertanian dan Pangan

Sektor pertanian dan pangan menempati posisi yang sensitif dalam kebijakan pasar bebas karena keterkaitannya dengan ketahanan pangan dan penghidupan jutaan petani skala kecil. Pemerintah cenderung menerapkan kebijakan yang lebih protektif pada komoditas pangan strategis, seperti beras dan gula, melalui pengaturan kuota impor dan penetapan harga acuan, guna melindungi petani domestik dari fluktuasi harga pangan global sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

d. Sektor Pertambangan dan Mineral

Pada sektor pertambangan, kebijakan pemerintah bergerak ke arah pembatasan ekspor bahan mentah guna mendorong hilirisasi, sebagaimana tercermin pada kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mendorong pertumbuhan pesat industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan ini menegaskan bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan momentum pasar bebas untuk mengubah struktur ekonomi dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah, meskipun konsekuensinya berupa gesekan dagang dengan negara mitra yang terdampak.

Kebijakan Hilirisasi sebagai Strategi Penguatan Nilai Tambah

Salah satu arah kebijakan yang semakin ditekankan pemerintah dalam merespons dinamika pasar bebas adalah kebijakan hilirisasi, yaitu strategi mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, guna meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kebijakan ini tercermin, misalnya, pada pembatasan ekspor bijih mineral mentah yang mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap pasar bebas, karena alih-alih menolak keterbukaan pasar, pemerintah berupaya mengubah posisi Indonesia dalam rantai nilai global dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah lebih tinggi. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi, seperti kebutuhan investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan serta potensi gesekan dengan mitra dagang yang merasa dirugikan oleh pembatasan ekspor bahan mentah.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Secara umum, kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor ekspor. Namun demikian, efektivitasnya masih dibatasi oleh sejumlah tantangan struktural. Pertama, rendahnya produktivitas dan daya saing sebagian besar UMKM membuat manfaat pasar bebas belum terdistribusi secara merata ke seluruh pelaku usaha. Kedua, lemahnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam perumusan kebijakan sering kali menimbulkan tumpang tindih regulasi yang menghambat kepastian usaha.

Ketiga, ketergantungan pada komoditas ekspor bernilai tambah rendah membuat perekonomian nasional rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Keempat, dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, seperti perang dagang antarnegara besar dan gejolak rantai pasok internasional, turut memengaruhi konsistensi arah kebijakan perdagangan Indonesia. Kelima, keterbatasan infrastruktur logistik di berbagai daerah masih menjadi kendala bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di luar pulau Jawa, untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor secara optimal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data (evidence-based policy), dan berorientasi jangka panjang agar Indonesia mampu memperoleh manfaat optimal dari keterbukaan pasar tanpa mengorbankan ketahanan ekonomi nasional. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan antara lain:

- Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan perdagangan, guna menghindari tumpang tindih regulasi.
- Peningkatan investasi pada riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia agar sektor industri domestik mampu bergerak ke segmen bernilai tambah lebih tinggi.
- Perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi bagi UMKM agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam rantai pasok ekspor.
- Diversifikasi mitra dagang dan produk ekspor untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pasar maupun komoditas tertentu.
- Evaluasi berkala terhadap kebijakan hilirisasi agar tetap kompetitif dan tidak menimbulkan distorsi pasar yang merugikan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Pasar bebas memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan pasar mendorong perluasan akses ekspor, peningkatan investasi asing, dan transfer teknologi; di sisi lain, keterbukaan tersebut turut meningkatkan tekanan persaingan bagi industri domestik dan UMKM. Kebijakan pemerintah, baik di bidang fiskal, moneter, perdagangan, perlindungan industri, maupun hilirisasi, memiliki peran strategis sebagai penyeimbang antara integrasi ekonomi global dan perlindungan kepentingan nasional.

Meskipun berbagai kebijakan telah memberikan hasil positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekspor, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan daya saing UMKM, diversifikasi mitra dan komoditas ekspor, serta perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih spesifik dan terukur dampak kebijakan tertentu, seperti perjanjian dagang bilateral atau kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu, terhadap sektor ekonomi spesifik di Indonesia, dengan pendekatan kuantitatif guna melengkapi temuan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada evaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok pelaku usaha tertentu, seperti UMKM di sektor manufaktur atau pertanian, untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). International Economics: Theory and Policy. Pearson Education.

Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics. Cengage Learning.

Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W.W. Norton & Company.

Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. W.W. Norton & Company.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Pearson Education.

Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press.

Salvatore, D. (2019). International Economics. Wiley.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026). Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bank Indonesia. (2026). Laporan Perekonomian Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

World Trade Organization. (2026). World Trade Report 2026: A Critical Juncture for the World Trading System. Geneva: World Trade Organization.

World Bank. (2026). World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence. Washington, DC: World Bank.

Akhmadi, H. (2017). Assessment the impact of ASEAN Free Trade Area (AFTA) on exports of Indonesian agricultural commodity. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 3(1). https://doi.org/10.18196/agr.3139

Amiti, M., & Konings, J. (2007). Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: Evidence from Indonesia. American Economic Review, 97(5), 1611–1638. https://doi.org/10.1257/aer.97.5.1611

Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does trade cause growth? American Economic Review, 89(3), 379–399. https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379

Rodrik, D. (2018). What do trade agreements really do? Journal of Economic Perspectives, 32(2), 73–90. https://doi.org/10.1257/jep.32.2.73

Rudijanto, A. (2025). Peran perjanjian perdagangan bebas (FTA) dalam mendorong efisiensi transaksi internasional bagi UMKM. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 19320–19326.